

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI
PULAU JAWA**

HARYANTO

8155082789



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI

JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2014

**THE INFLUENCE OF LOCAL TAX AND GENERAL
ALLOCATION FUND TO THE CAPITAL EXPENDITURE IN
JAVA**

**HARYANTO
8155082789**



Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

**STUDY PROGRAM OF ECONOMIC EDUCATIOAN
CONCENTRATION IN ACCOUNTING EDUCATION
DEPARTEMENT OF ECONOMIC AND ADMINISTRATION
FACULTY OF ECONOMIC
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2014**

ABSTRAK

Haryanto, 2014 : Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pulau Jawa melalui tes secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2012. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data laporan realisasi anggaran penerimaan dan belanja daerah untuk tahun 2012. Jumlah sampel yang terkumpul adalah tujuh puluh dua (72) pemerintah daerah yang diambil secara random sampling.

Penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai signifikansi 0,000. Selain juga didapatkan nilai t hitung 3,803 lebih besar dari nilai t tabel 1.667. Sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai signifikansi 0.000, selain juga didapatkan nilai T hitung 8,044 lebih besar dari nilai t tabel 1.667. Uji simultan membuktikan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama signifikan berpengaruh secara statistik terhadap belanja modal.

Kata kunci: pajak daerah, dana alokasi umum, belanja modal.

ABSTRACT

Haryanto, 2014: The Influence of Local Taxes and General Allocation Fund to the Capital Expenditure in Java.

This study aims to test the Local Taxes and the General Fund to the Capital Expenditure Allocation in Java through tests simultaneously and partially. This study uses secondary data obtained from the website of the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia for the year 2012 data collected in this study include budget realization report data revenues and expenditures for the year 2012 is the number of samples collected seventy-two (72) local governments are taken by proportional random sampling.

This study proves that the positive effect of local taxes on capital expenditure with a significance value of 0.000. Besides also obtained T value 3.803 is greater than the value of 1,667 T table. While the general allocation fund is also a positive effect on capital expenditures with a significance value 0.000, as well as the value obtained 8.044 T count is greater than the value of 1,667 t table. Simultaneous test proves that the general allocation fund and special fund allocations are jointly statistically significant effect on capital expenditures.

Keywords: local taxes, general fund allocations, capital expenditure.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi**



Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus

NIP. 196712071992031001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>M. Yasser Arafat, S.E., Akt, M.M.</u> 197104132001121001	Ketua		22 Juli 2014
2. <u>Susi Indriani, SE, M.Si., Ak</u> 19760820200912200	Sekretaris		23 Juli 2014
3. <u>Dra. Sri Zulaihati, M.Si.</u> 196102281986022001	Penguji Ahli		24 Juli 2014
4. <u>Santi Susanti, S.Pd., M.Ak.</u> 197701132005012002	Pembimbing I		22 Juli 2014
5. <u>Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.</u> 197705172010121002	Pembimbing II		24 Juli 2014

Tanggal Lulus: 18 Juli 2014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 13 Juli 2014

Yang membuat pernyataan
Materai Rp 6.000,00



Haryanto
No.Reg 8155082789

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ekonomi & Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan. Namun berkat izin dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih untuk Allah SWT Tuhan semesta alam. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu secara khusus penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Matlap (almarhum) dan Ibu Umi Salamah, kedua orang tuaku yang selalu tulus ikhlas berjuang dan menyayangi anak – anaknya.
2. Kang Hakim, Kang Ali, Mba Anah, Kang Khanif, Kang Amat, Kang Irkham, Mas Roziqin, Mas Fakhrudin, dan Agung. Kita 10 bersaudara yang lahir dari rahim yang sama. Terima kasih atas segala perhatian yang selalu diberikan.
3. Drs. Dedi Purwana, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

4. Drs. Nurdin Hidayat, MM.,M.Si.,selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
5. Dr. Siti Nurjanah, SE.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
6. Santi Susanti, S.Pd.,M.Ak., selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing saya selama masa kuliah.
7. Ahmad Fauzi, S.Pd.,M.Ak., selaku dosen pembimbing II yang menjadi salah satu inspirasi saya untuk terus belajar.
8. Bapak - Ibu dosen favorit saya ; Bu Ati Sumiati, Bu Susi Indriani, Bu Sri Zulaihati, Bu Ratna, Pak Yasser Arafat, Bu Erika Takidah. Terima kasih untuk ilmu dan keteladanan yang telah diberikan.
9. Mufrodah, selaku teman, sahabat dan kekasih.
10. Keluarga Besar UKM UNJ dan Badan Pengurus Harian “Kapulaga” yang telah banyak memberi pelajaran, pengalaman dan kenangan.
11. Keluarga Besar PMII UNJ yang telah memberikan arti nilai – nilai perjuangan.
12. Seluruh teman – teman kelas Pendidikan Akuntansi angkatan 2008 dan 2010 yang silih berganti menemani saya kuliah.
13. Keluarga besar Bimbingan Belajar Makara Insani.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada para pembaca.

Jakarta, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN TEORITIK	
A. Belanja Modal	10
B. Pajak	12

1. Pengertian Pajak	12
2. Pajak Daerah	16
C. Dana Alokasi Umum	18
D. Hasil Penelitian Relevan	21
E. Kerangka Toeritis	28
F. Perumusan Hipotesis	30
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	33
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	33
C. Metode Penelitian	33
D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Konstelasi Hubungan antar Variabel	35
G. Teknik Analisis Data	36
1. Persamaan Regresi Berganda	36
2. Uji Persyaratan Analisis	37
3. Uji Asumsi Klasik	37
4. Uji Hipotesis	41
5. Uji Koefisien Determinasi	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	45
B. Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis	53
1. Persamaan Regresi Berganda	53

2. Uji Persyaratan Analisis	55
a. Uji Normalitas	55
b. Uji Multikolenieritas	56
c. Uji Autokorelasi	57
d. Uji Heterokedasitas	58
3. Uji Hipotesis	61
a. Uji F (Simultan)	59
b. Uji T (Parsial)	62
c. Uji Koefisien Determinasi	64
4. Pembahasan	64
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Implikasi	70
C. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Sampel Data Variabel X_1 Pajak Daerah	76
2.	Sampel Data Variabel X_2 Dana Alokasi Umum	77
3.	Sampel Data Variabel Y Belanja Modal	78
4.	Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram Variabel X_1	79
5.	Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram Variabel X_2	80
6.	Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram Variabel Y	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tabel Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal	3
1.2 Tabel Realisasi Triwulan I APBD Jawa Tengah	5
2.1 Tabel Klasifikasi Belanja	11
2.2 Tabel Penyederhanaan Pajak dalam Reformasi Perpajakan	24
3.1 Tabel Range Durbin Watson untuk Autokorelasi	38
4.1 Tabel Deskripsi Data	43
4.2 Tabel Frekuensi Distribusi Belanja Modal	45
4.3 Tabel Frekuensi Distribusi Pajak Daerah	48
4.4 Tabel Frekuensi Dana Alokasi Umum	50
4.5 Tabel Persamaan Regresi Berganda	52
4.6 Tabel Uji Normalitas	54
4.7 Tabel Multikoleniaritas	55
4.8 Tabel Uji Durbin Watson	56
4.9 Tabel Non Paramtric Correlation	58
4.9 Tabel Uji Koefisien Korelasi Ganda	59
4.10 Tabel Uji F (ANOVA)	60
4.11 Tabel Uji T	61
4.12 Tabel Koefisien Determinasi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Klasifikasi Belanja	11
4.1	Grafik Histogram Belanja Modal	48
4.2	Grafik Histogram Pajak Daerah	51
4.3	Grafik Histogram Dana Alokasi Umum	53
4.4	Gambar Normal P.Plot of Regression Standardized Residual	55
4.5	Gambar Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 1998 menjadi salah satu tonggak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Pada tahun inilah, setelah 32 tahun rezim orde baru berkuasa, kini akhirnya tumbang dan berganti masa memasuki orde reformasi. Orde reformasi dianggap sebagai momentum untuk restrukturisasi segala bidang sistem pemerintahan. Terlebih lagi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah yang mana pada masa orde baru dianggap terlalu sentralistik dan penuh dengan aroma KKN. Oleh karena itu, dalam bidang manajemen keuangan daerah, reformasi ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemberlakuan Otonomi Daerah mempunyai tujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, untuk merealisasikannya pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan yakni Undang – undang Nomor 32 tahun 1999 (Revisi menjadi UU No.32 tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 (Revisi menjadi UU No.33 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan. Dalam Undang - undang No.33 tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi fiskal. Dari sinilah dimulainya sejarah penerapan apa yang disebut Sistem Otonomi Daerah.

Selanjutnya, implikasi dari diterapkannya Undang - undang otonomi daerah, khususnya dalam manajemen keuangan daerah yaitu kewajiban pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh kepala daerah dan bertanggung jawab kepada DPRD dan masyarakat. APBD mempunyai peran yang vital dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah. APBD menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan roda pemerintahan pada periode yang bersangkutan sekaligus indikator keberhasilan dari pemerintahan yang diselenggarakan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

Dalam bentuk APBD yang baru itu pula, penerimaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Menurut Anggiat Situngkir dan John Manurung, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik¹. Saragih melalui Anggiat Situngkir dan John Manurung menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan². Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu

¹ Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung. Efek Memiliki Pendapatan Asli Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. (Kajian Akuntansi Vol.4 No.2, 2009). p.93-103

² Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung, *ibid*.

meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan indikator besar kecilnya investasi daerah terlihat dari besar kecilnya alokasi belanja modal dalam APBD. Namun, pada realisasi di lapangan, hampir di semua tingkatan pemerintahan, pendapatan yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk Belanja Operasi dibandingkan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan belanja pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja hibah sedangkan Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dalam Tabel I.1 tentang Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal pada 5 kabupaten di provinsi Jawa Timur tahun 2012.

Tabel I.1
Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

(dalam jutaan rupiah)

Kab/Kota	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja	% Belanja Operasi	%Belanja Modal
Kab. Gresik	783.742	114.606	1.112.731	70,4%	10,3%
Kab. Jember	1.067.028	490.067	2.115.511	50,4%	23,2%
Kab. Jombang	636.402	260.361	1.273.933	50%	20,4%
Kab. Kediri	844.728	311.983	1.552.078	54,42%	20,1%
Kab. Lamongan	806.457	262.121	1.432.606	56,3%	18,3%

Sumber : djpk.go.id. Kementrian Keuangan Tahun 2012.

Berdasarkan data tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari lima kabupaten di Jawa Timur tahun 2012, alokasi Belanja Modal tidak lebih dari 25% dari total belanja daerah, sedangkan alokasi untuk belanja operasi berada pada angka sekitar 50% bahkan 70%. Hal tersebut juga selaras dengan penuturan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono melalui www.medanbisnisdaily.com bahwa,

Anggaran pemerintah daerah tahun 2013 sebagian besar dihabiskan untuk belanja pegawai. Antara lain pembayaran gaji PNS, tunjangan dan pensiun. Memang hal tersebut tidak berlaku pada semua daerah, rata-ratanya adalah 48%, tapi ada daerah yang sampai dengan 60%, tapi ada daerah juga yang membelanjakan untuk pegawai hanya 30%³.

Jika dilihat dari segi manfaat, alokasi anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan anggarannya untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung, tetapi anggaran masih lebih banyak digunakan untuk membiayai pelaksanaan operasional dari pemerintahan tersebut.

Dengan demikian pemerintah harus mempunyai tekad untuk mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan alokasi belanja modal, maka perlu diketahui variabel – variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Peningkatan alokasi belanja tentu tidak bisa dilepaskan dari peningkatan pendapatan, maka variabel yang dapat mempengaruhi belanja modal diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (Pajak daerah, Retribusi, dan laba usaha daerah), Dana Perimbangan (DAU, DAK, Dana bagi hasil).

Dari kedua komponen utama pendapatan diatas, dapat kita rinci lagi bahwa Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum masing – masing memberikan kontribusi terbesar dalam mayoritas pendapatan daerah di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Realisasi Triwulan I APBD Tahun Provinsi Jawa Tengah tahun 2012.

³http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/08/20/46007/anggaran_pemerintah_daerah_habis_hanya_untuk_bayar_gaji_pns/#.UoSmridIm1s. Diakses tanggal 14 November 2013

Tabel 1.2
Data Realisasi Triwulan I APBD Provinsi Jawa Tengah.
Tahun Anggaran 2012 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Prov. Jawa Tengah
Pendapatan	2,663,055
PAD	1,303,214
Pajak daerah	1,259,837
Retribusi daerah	13,272
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3,970
Lain-lain PAD yang sah	26,135
Dana Perimbangan	658,118
DBH	137,297
DAU	505,631
DAK	15,189

Sumber : djpk.go.id. Kementerian Keuangan Tahun 2012.

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa terdapat selisih yang cukup tinggi antara pendapatan dari sektor pajak daerah dan DAU dibandingkan dengan jumlah pendapatan dari sektor lainnya. Kendati wilayah Indonesia dikenal mempunyai sumber daya alam yang berlimpah, pajak masih tetap menjadi sektor pendapatan terbesar dari total pendapatan pemerintah. Menurut data dari antaranews.com. Pajak dan bea cukai menjadi penyumbang terbesar pemasukan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 dengan nilai Rp1.016 triliun atau 78,64 persen dari keseluruhan pendapatan⁴.

Pajak Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai seperti di Pulau Jawa, akan memberikan potensi

⁴ (<http://www.antaranews.com/berita/324540/pajak-sumbang-7864-persen-pendapatan-negara>. Diakses 4 September 2013)

pajak yang diperoleh cukup besar. Tetapi untuk daerah lain yang notabene kondisi perekonomian kurang maju, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas.

Porsi pendapatan terbesar kedua bagi pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing – masing daerah. Dana ini dialokasikan secara rutin dari Pemerintah Pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal).

Perpaduan antara Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum menjadi komponen utama penerimaan pemerintah daerah merupakan representasi semangat otonomi yang diamanatkan undang – undang. Pajak Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan daerah guna mencapai kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum merupakan perwujudan peran pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di daerah seluruh Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi rendahnya jumlah belanja modal pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Penerimaan Pajak Daerah.
2. Rendahnya Penerimaan retribusi daerah.
3. Rendahnya Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
4. Dana Alokasi Umum dari Pemerintah pusat lebih banyak digunakan untuk gaji pegawai.
5. Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian belanja modal dalam APBD.

C. Pembatasan Masalah

Dikarenakan keterbatasan penelitian dalam upaya pemecahan masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian kali ini sebagai berikut :

- 1) Apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah ?
- 2) Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pemerintah daerah ?

- 3) Apakah pajak daerah dan dana alokasi umum bersama–sama berpengaruh terhadap belanja modal ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan, diantaranya:

- 1) Mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah.
- 2) Mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintah daerah.
- 3) Mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, bagi para mahasiswa lain dan bagi masyarakat pada umumnya.

- 1) Bagi peneliti:
 - a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang akuntansi pemerintah.
 - b. Sebagai salah satu pedoman bagi peneliti dalam meneliti permasalahan serupa dikemudian hari.
- 2) Bagi mahasiswa lain :
 - a. Sebagai salah satu landasan untuk melakukan penelitian serupa.
 - b. Sebagai referensi dalam mempelajari bidang akuntansi pemerintah terutama topik mengenai dana perimbangan dan belanja daerah.
- 3) Bagi masyarakat :

Sebagai bahan rujukan bagi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah dalam pengalokasian dana perimbangan dan alokasi belanja modal demi kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Belanja Modal

Menurut Dedi dkk. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.⁵ Sedangkan definisi belanja modal menurut Abdul Halim sebagai berikut,

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan⁶.

Sedangkan menurut Mahmudi, menjelaskan Belanja Modal yaitu,

Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang – barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, *software*, dan sebagainya⁷.

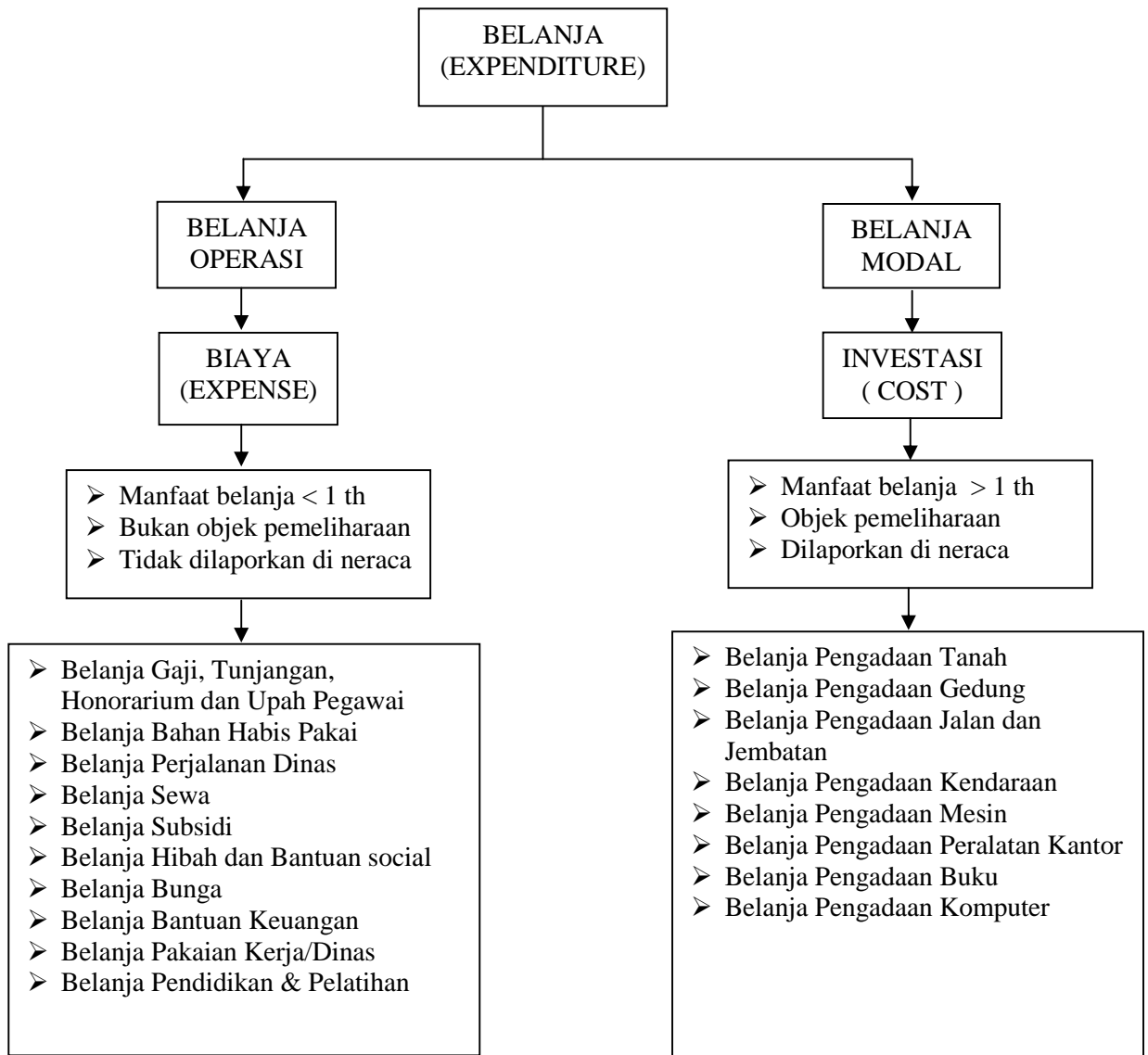
Kedudukan Belanja Modal memiliki peran yang penting dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan alokasi belanja modal akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan di suatu daerah. Mahmudi menunjukkan kedudukan belanja modal dalam tabel berikut,

⁵ Deddi Nordiawan dkk., *op.cit*, p.187

⁶ Abdul Halim, *Op.cit*. p.56

⁷ Mahmudi, *loc.cit*. p.96

Gambar 2.1
Klasifikasi Belanja



Sumber : Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah. 2010.

Selanjutnya menurut Syaiful, Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, diantaranya :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah⁸.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda – beda. Menurut Jones melalui Simanjuntak dan Mukhlis pajak didefinisikan sebagai

*“ ...a tax can be defined simply as a payment to support the cost government. A tax differ from a fine or penalty imposed by a govenrment because a tax is not intended to deter or punish unacceptable behavior. On the other hand, tax are compulsory, anyone subject to a tax is not free to choose whether or not to pay”*⁹.

(Pajak secara sederhana didefinisikan sebagai pembayaran yang digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah. Pajak berbeda dari denda

⁸ Syaiful, Syaiful. 2007. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*.

⁹ Hamonangan Simanjuntak & Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (Depok : Raih Asa Sukses, 2012) p.9

atau hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah karena pajak tidak dimaksudkan untuk mencegah atau menghukum perilaku melanggar aturan. Di sisi lain, pajak adalah kewajiban, Setiap orang menjadi subyek pajak tidak dapat memilih antara membayar atau tidak membayar pajak).

Sementara itu menurut Rochmat Soemitro melalui Fidel,

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum¹⁰.

Definisi Menurut S.I. Djajadiningrat melalui Siti Resmi,

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum¹¹.

Definisi menurut Edwin R.A. Seligman melalui Waluyo,

Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred¹².

(Pajak adalah adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan khusus pada seseorang).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara baik dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang – undang.

¹⁰ Fidel, Cara Mamahami Masalah – Masalah Perpajakan (Jakarta: Murai Kencana, 2010) p.17

¹¹ Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6 Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2012) p.1

¹² ¹² Waluyo, Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2011) p.2

- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Dasar pengaturan pajak di Indonesia terdapat didalam UUD 1945, Undang - undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah hingga ke peraturan Direktorat Jendral Pajak. Oleh karena itu, menurut Irwansyah Lubis, Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mempunyai 2 pilihan yaitu:

- 1) Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai undang – undang perpajakan dan aturan pelaksanaannya atau taat hokum (*lawfull*).
- 2) Tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai undang – undang perpajakan dan aturan pelaksanaannya atau tidak taat hukum¹³.

Bila Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak taat hukum, ada resiko baginya sanksi perpajakan yang akan dikenakannya pada saat ini atau masa akan dating yang merugikan diri sendiri baik usahanya atau pihak – pihak yang terkait, antara lain: berupa pemborosan *cash flow* , waktu, perasaan tidak nyaman, dan lain-lain. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang – undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar perundang-undangan perpajakan.

Terdapat beberapa fungsi pajak, Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi yaitu :

¹³ Irwansyah Lubis, Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2011) p.107

1) Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang – undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan juga menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan wajib pajak.

Selain itu juga terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2. Pajak Daerah

Menurut Waluyo, Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah¹⁴. Sedangkan menurut Siti Resmi, Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing¹⁵. Menurut Suparmoko, Pajak Daerah adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung¹⁶. Menurut Abdul Halim, Pajak Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pajak¹⁷. Marihot P. Siahaan menambahkan pengertian pajak daerah,

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹⁸

Pengoptimalan penerimaan pajak daerah guna menunjang penerimaan pendapatan asli daerah sebagai usaha kemandirian pemerintah daerah sangat diperlukan. Namun, usaha tersebut jangan sampai membuat perekonomian daerah terganggu akibat pajak yang dipungut terlalu besar. Oleh karena itu, manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip – prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Devas melalui Mahmudi menjelaskan prinsip pajak daerah tersebut sebagai berikut :

1. Prinsip Elastisitas

¹⁴ Waluyo, *op.cit.* p.12

¹⁵ Siti Resmi, *op.cit.* p.8

¹⁶ Suparmoko, *loc.cit.* p.61

¹⁷ Abdul Halim, *loc.cit.* p.22

¹⁸ Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005) p.10

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

2. Prinsip Keadilan

Pajak harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan social kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

3. Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam siste administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya kesederhanaan, kemudahan, dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam membayar pajak.

4. Prinsip Keberterimaan Politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD dan melibatkan kelompok – kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah. Bahkan, jika dimungkinkan, melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu.

5. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negative terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen atau produsen. Namun, diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonoian daerah¹⁹.

Terkait dengan prinsip – prinsip pajak tersebut, maka manajemen perpajakan daerah harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Selain itu, peerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut. Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga tidak terlalu besar sebab jika sangat fluktuatif juga kurang baik untuk perencanaan keuangan daerah.

¹⁹ Mahmudi, *op.cit.* p.21

Didalam pajak daerah dibagi dalam dua kelompok yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota. Adapun yang termasuk kedalam pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Beromotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

C. Dana Alokasi Umum

Menurut Deddi dkk , Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi²⁰. Abdul Halim juga mendefinisikan Dana Alokasi Umum, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²¹ Sedangkan menurut Widjaja Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi²². DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto.

²⁰Deddi Nordiawan dkk., Akuntansi Pemerintahan (Jakarta: Salemba Empat, 2008) p.56

²¹21 Abdul Halim, *loc. cit.* p.24

²²Widjaja, HAW. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005) p.75

- 2) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90% DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Menurut Deddi dkk Formula perhitungan DAU adalah²³ :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan). Setiap kebutuhan pendanaan tersebut diukur secara berturut-turut menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indek Kemahalan Konstruksi, PDRB, dan IPM, sedangkan pasitas fiskal daerah dihitung berdasarkan Pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dan jumlah DAU seluruh provinsi.

²³ Deddi Nordiawan dkk., Akuntansi Pemerintahan (Jakarta: Salemba Empat, 2008) p.

Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh provinsi.

Sementara DAU atas celah fiskal untuk kabupaten atau kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota.

Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks domestik regional bruto per kapita, sedangkan menurut Deddi dkk kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil²⁴.

$$\text{Kebutuhan Fiskal} = \text{Total Belanja Rata - rata} \times \left[\begin{array}{l} a1 \text{ indeks jml penduduk} + \\ a2 \text{ indeks luas wilayah} + \\ a3 \text{ indeks kemahalan} \\ \text{konstruksi} + a4 \text{ indeks} \\ \text{pembangunan manusia} + \\ a5 \text{ indeks PDRB per kapita} \end{array} \right]$$

Daerah yang memiliki celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah

²⁴ Deddi Nordiawan dkk., Akuntansi Pemerintahan (Jakarta: Salemba Empat, 2008) p.

fiskal. Dan, daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

3. Hasil Penelitian Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. M. Haidar Hussain dengan judul “On the Causal Relationship between Government Expenditure and Tax Revenue in Pakistan. Dalam penelitian ini diungkapkan teori sebagai berikut ; Friedman (1972, 1978) *supports the view that increasing taxes means that one would have just as large a deficit but at a higher level of government expenditures* (Friedman mendukung pandangan bahwa peningkatan pajak berarti menjadi pengeluaran pribadi seseorang, pada tahap selanjutnya akan menjadi pengeluaran pemerintah.
2. Roshaiza Taha and Nanthakumar Loganathan dengan judul “*Causality Between Tax Revenue and Government Spending in Malaysia*”. Dalam penelitian ini diungkapkan teori sebagai berikut : Loganathan and Taha (2007) findings have demonstrated a consistent relation between revenue and spending. Wang (2007), Padovano and Galli (2002), and Brown (2002) argued that tax has a significant impact on economic growth. (Dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang konsisten antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Selain itu pajak juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi).

3. Holtz-Eakin et. al. dengan judul "*Intemporal Analysis of State and Local Government Spending : Theory and Tests*". Dalam penelitian ini diungkapkan teori sebagai berikut : *Intemporal approaches to decision making assume that agents are forward looking. They make their decisions regarding today's expenditures on the basis of their expectations about future resources. This decision maker's goal is to maximize the expected present value of utility (which depends on government expenditures) subject to an intemporal budget constraint.* (Dijelaskan bahwa agen (*agents*) atau politisi di Pemda bersikap seolah-olah mereka memaksimalkan utilitas individu (*voter*) berpendapatan menengah kebawah di dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan belanja publik untuk periode tertentu, agen akan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya berdasarkan pada ekspektasinya terhadap lingkungan ekonomi pada masa yang akan datang. Secara teoritis diasumsikan bahwa semua pengeluaran pada suatu periode tertentu tergantung pada ketersediaan sumberdaya pada periode bersangkutan, namun dengan batasan aturan anggaran yang ada, misalnya anggaran berimbang (*balanced-budget rule*). Dalam konsep anggaran berimbang Pemda diharuskan menyerahkan anggarannya kepada legislative sebelum tahun fiskal berjalan, tetapi tidak mengatur bagaimana pengeluaran harus diprioritaskan atau bagaimana komponen-komponen pengeluaran ditentukan. Oleh karena itu, Pemda dapat melakukan *smoothing* atas pengeluaran-pengeluarannya karena

memang tidak ada aturan yang secara efektif digunakan untuk mencegahnya.

4. Darwanto dan Yulia Yustikasari dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dalam penelitian ini diungkapkan beberapa teori sebagai berikut :
 - a. Holtz-Eakin et. al. (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel - variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non- linier* dan *asymmetric*.
 - b. Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU 32/2004) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi atas alokasi yang mengandung *lucrative opportunities* dan memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja

publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*. Studi Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Abdullah (2004) menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Temuan ini mengkonfirmasi pendapat Colombatto (2001).

5. Syukriy Abdullah dan Abdul Halim dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah: Studi Kasus Kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Dalam penelitian ini diungkapkan teori sebagai berikut, Holtz-Eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrenzi & Milas (2001), menggunakan sampel municipalities di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah.
6. Askam Tuasikal dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Modal”. Dalam penelitian ini diungkapkan teori sebagai berikut, Terkait dengan pernyataan tersebut Harianto (2007) menunjukkan DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan PAD. Demikian pula belanja modal dan PAD berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Senada dengan Arrianito Darwanto (2007)

menegaskan pertumbuhan ekonomi, DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Di samping itu, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Per Kapita. Demikian pula Abdullah dan Halim (2002) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Maimuna dan Rusdi (2008) mengaskan DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh BAPENAS (2003) menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa dengan peningkatan PAD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu pemerintah daerah yang tercermin dalam PDRB. Harianto (2007) menegaskan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal.

7. Fransisca Roosiana Kurniawati dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia”. Dalam penelitian ini diungkapkan teori sebagai berikut, Abdullah dan Halim (2003) melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan adanya pengaruh positif DAU terhadap belanja daerah, baik tanpa *lag* maupun dengan *lag*. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian Sulistyawan (2004) yang hasilnya konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim. Dari uraian diatas, peneliti akan melakukan pengujian tentang pengaruh DAU terhadap belanja daerah tanpa *lag* maupun dengan *lag* 1 tahun sampai 3 tahun.

8. Kusnandar dan Dodik Siswantoro dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal”. Dalam penelitian ini diungkapkan teori sebagai berikut : Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), dan Solikin (2007) dan Putro (2011) menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal (Putro, 2011). Namun Moisiso (2002 dalam Abdullah dan Halim, 2006) menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti *grant* atau transfer).
9. David Harianto dan David Hari Adi dengan Judul “Hubungan Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita”. Dalam penelitian ini diungkapkan teori sebagai berikut, Dalam penelitiannya Holtz-Eakin et al (1994) menyatakan terhadap keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bawasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja

modal. Prakoso (2004) memperoleh temuan empiris yang sama yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat.

10. Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung dengan judul “Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kabupaten/kota Sumatera Utara. Dalam penelitian ini diungkapkan teori sebagai berikut , Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin *et al.* (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.
11. Arbie Gugus Wandira dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian ini diungkapkan teori sebagai berikut Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani 2011). Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Hasil penelitian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal.

4. Kerangka Teoritis

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan mandat yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi birokrasi. Bersamaan dengan itu pula melekat perluasan kewenangan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah berdasarkan potensi ekonomi yang tersedia demi tercapainya cita – cita pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah. Dengan desentralisasi fiskal, daerah diberikan kekuasaan lebih jauh untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan untuk memperoleh transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Namun, pada realisasi di lapangan, hampir di semua tingkatan pemerintahan, pendapatan yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk Belanja Operasi dibandingkan Belanja Modal. Dengan demikian pemerintah harus mempunyai tekad untuk mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan alokasi belanja modal, maka perlu diketahui variabel – variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Peningkatan alokasi belanja tentu tidak bisa dilepaskan dari peningkatan penerimaan daerah.

Komponen penerimaan daerah dalam APBD secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga, yakni Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan Keuangan, dan penerimaan lain – lain yang sah. Pada sektor Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah menempati porsi terbesar. Sebagai salah satu sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan Pemerintah Daerah. Menurut Cullis dan Jones melalui Simanjuntak dan Mukhlis, Pemanfaatan sumber dana pembiayaan dalam negeri, khususnya pajak memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan (*sustainability*) pembangunan suatu negara²⁵. Ditambahkan menurut Simanjuntak bahwa penerimaan pajak yang besar dapat menyebabkan berkembangnya *discretion* (kebijaksanaan) pemerintah daerah khususnya dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Sebaliknya penerimaan pajak yang kecil menyebabkan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah menjadi terhambat²⁶. Selain itu menurut Suparmoko disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah²⁷. Ditambahkan pula menurut Siti Resmi bahwa berdasarkan dari fungsi *budgeter*, pajak merupakan instrument untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah²⁸.

Selanjutnya sumber penerimaan utama Pemerintah Daerah selain pajak daerah adalah Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Dapat dijelaskan bahwa sebagai salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah

²⁵ Hamonangan Simanjuntak & Imam Mukhlis, *op.cit.*, p.121

²⁶ Simanjuntak dan Mukhlis, *op.cit.* p.165

²⁷ Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. (Yogyakarta: ANDI, 2002) p.34

²⁸ Siti Resmi, *op.cit.*, p.3

daerah, alokasi dana perimbangan mengandung tujuan pemerataan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana perimbangan diberikan agar setiap daerah mendapatkan bagian keuangan sesuai dalam undang – undang perimbangan keuangan daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Dari ketiga komponen tersebut Dana Alokasi Umum memiliki porsi yang besar dalam menyumbang penerimaan daerah, bahkan paling besar diantara semua komponen penerimaan daerah lainnya. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis, diketahui bahwa,

“ ... adanya dana perimbangan dimaksudkan untuk mensubsidi pemerintah daerah dalam membiayai pengeluarannya. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dengan semakin besar dana perimbangan diterima oleh daerah, maka alokasi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan akan semakin besar”²⁹.

Berdasarkan beberapa teori tersebut, dapat diambil benang merah bahwa pajak yang telah dipungut dari rakyat selanjutnya akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah sebagai modal pembiayaan pembangunan suatu daerah. Selain itu, dalam rangka pemberlakuan Otonomi daerah maka terdapat juga Dana Perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan daerah, dimana Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan. Pembangunan suatu daerah tentu tidak bisa dilepaskan dari pembangunan infrastruktur dan pembelian aset tetap yang dialokasikan dari Belanja Modal Pemerintah Daerah.

Selain itu, Machfud Sidiq dkk. juga memaparkan bahwa di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi

²⁹Hamonangan Simanjuntak & Imam Mukhlis, op.cit., p.151

oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik et al, 2002)³⁰. Ditambahkan pula berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin *et al.* menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah³¹. Berdasarkan struktur anggaran daerah Mardiasmo membagi belanja aparatur daerah salah satunya kedalam belanja modal/pembangunan (belanja langsung yang digunakan untuk kegiatan menambah aset tetap atau investasi).³²

Selain itu, dikemukakan pula bahwa pajak daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh kepada belanja modal. Menurut Darwanto dan Yulia Yustikasari, hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal³³. Selain itu, menurut Kusnandar dan Dodik Siswantoro, Secara simultan variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah.³⁴ Selanjutnya menurut penelitian Kesit Bambang Prakosa secara empiris membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU

³⁰ Machfud Sidiq.2002.

³¹ Holtz-Eakin, Douglas, Harvey Rosen. Intertemporal analysis of state and local government spending: Theory and tests. (Journal of Urban Economics 35, 1994): 159-174

³² Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. (Yogyakarta, ANDI,2002) p.187

³³ Darwanto dan Yulia Yustikasari. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. 2007

³⁴ Kusnandar dan Dodik Siswantoro. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia.

yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.³⁵

5. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teoritis dan kerangka berpikir diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal.
2. Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
3. Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Modal.

³⁵ Kesit Bambang Prakosa. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah. JIAI Volume 8 No.2 Desember 2004.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan fakta yang valid, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengaruh antara Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Pulau Jawa.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa, yaitu Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal tahun 2012.

C. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah.

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya³⁶. Populasi dalam penelitian ini

³⁶ Sugiono, *Statistik untuk Penelitian*, (Bandung : CV Alfabeta,2007), hal.61

adalah seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa dengan jumlah 118 kabupaten/kota. Sedangkan populasi terjangkau penelitian ini adalah kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *proporsional random sampling*. Metode *random sampling* merupakan metode pengambilan sampel secara acak dengan memperhatikan anggota/unsur yang tidak homogen. Berdasarkan tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5% maka sampel yang diambil adalah 72 data dengan pembagian sampel Jawa Barat 16, Jawa Tengah 26, Jawa Timur 26, DIY 4.

Tabel 3.1
Tabel Pembagian Proporsi Sampel

Wilayah	Kabupaten/ kota	Hasil Proporsi wilayah Sampel
Jawa Barat	19	16
Jawa Tengah	33	26
Jawa Timur	33	26
DIY	5	4
Jumlah	90	72

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pajak Daerah

1) Definisi Konseptual

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2) Definisi Operasional

Pajak Daerah sebagai variabel bebas ($X1$) adalah jumlah nominal realisasi pajak daerah kabupaten/kota yang berhasil dipungut berdasarkan laporan realisasi anggaran kabupaten/kota di Pulau Jawa periode 2012.

2. Dana Alokasi Umum

1) Definisi Konseptual

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2) Definisi Operasional

Dana Alokasi Umum sebagai variabel bebas ($X2$) adalah jumlah nominal realisasi anggaran Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2012.

3. Belanja Modal

1) Definisi Konseptual

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

2) Definisi Operasional

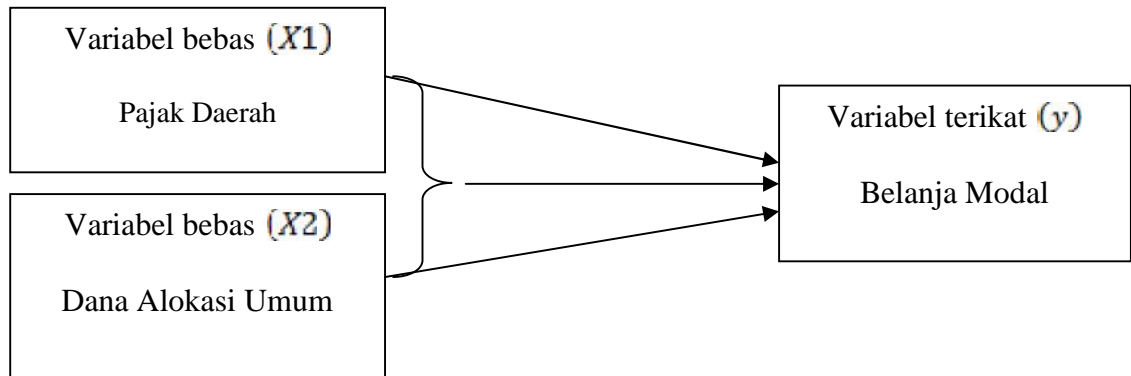
Belanja modal sebagai variabel terikat (Y) adalah jumlah nominal realisasi belanja modal yang didapat dari laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa periode tahun 2012.

F. Konstelasi Hubungan Antar Variabel/Desain Penelitian

Variabel yang diteliti,

Variabel bebas : Jumlah Pajak Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2)

Variabel terikat : Belanja Modal (Y)



G. Teknik Analisis Data

1. Persamaan Regresi Berganda

Model regresi berganda merupakan suatu model regresi yang terdiri dari lebih dari satu variabel independen. Secara umum, persamaan regresi adalah.³⁷

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2$$

Yang menyatakan bahwa :

X_1 : Variabel bebas (Pajak Daerah)

X_2 : Variabel bebas (Dana Alokasi Umum)

Y : Variabel terikat (Belanja Modal)

a : Konstanta

b_1 dan b_2 : Koefisien korelasi slop variable bebas

Harga a , b_1 dan b_2 dapat dihitung dengan rumus :³⁸

³⁷ Sugiyono, *Op. Cit.*, p. 278

³⁸ Sugiyono, *Loc. Cit.*, p. 332

$$\begin{aligned}\sum Y &= n \cdot a + b_1 \sum X_1 + b_2 \sum X_2 \\ \sum X_1 Y &= a \sum X_1 + b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2 \\ \sum X_2 Y &= a \sum X_2 + b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2\end{aligned}$$

Untuk penyimpangan atau eror yang minimum, digunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Metode OLS dapat memberikan penduga koefisien regresi yang baik atau bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) dengan asumsi-asumsi tertentu yang tidak boleh dilanggar. Teori tersebut dikenal dengan Teorema Gaus Markov.

2. Uji Persyaratan Analisis

Pengujian analisis data yang menggunakan teknik korelasional dengan dua bertuk perhitungan yaitu korelasi *product moment* dan regresi diperlukan asumsi asumsi tertentu agar intepretasi terhadap hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari sudut pandang statistika. Uji persyaratan analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residualnya mempunyai distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah model yang kita gunakan memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisa grafik dan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Dengan taraf signifikansi (α) = 5%. Kriteria pengambilan keputusan dengan metode ini yaitu:

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal
- b. Jika Signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Kriteria pengambilan keputusan dengan analisa grafik (*normal probability*) yaitu sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*best linear unbiased estimator*) yakni tidak terdapat heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas dan tidak terdapat autokorelasi.

1) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya atau dengan kata lain suatu variabel bebas yang merupakan fungsi linear dari variabel bebas lainnya.

Adanya multikolinearitas menyebabkan standar error cenderung semakin besar dengan meningkatnya tingkat korelasi antar variabel standar error menjadi

sangat sensitif terhadap perubahan data. Akibat adanya multikolinearitas adalah estimasi akan terafiliasi sehingga menimbulkan bias dalam spesifikasi.

Menurut Hair et. al Multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Tolerance Value adalah suatu jumlah yang menunjukkan bahwa variabel bebas tidak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya dalam suatu nilai yang menunjukkan tidak adanya multikolinearitas dalam persamaan regresi. Apabila nilai $VIF > 10$ dan $tolerance < 0,1$ maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya jika $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

2) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Terdapat dua cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu metode grafik dan metode uji statistik.

a. Metode Grafik

Metode ini dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada scatterplot regresi.

Kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, dan kemudian menyempit) maka terjadi heterokedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

b. Uji Statistik

Uji statistik ini dilakukan dengan Uji Spearmans rho', yaitu mengkorelasikan nilai residual dengan masing-masing variabel independen. Hipotesis awalnya adalah

H_0 = tidak ada heteroskedastisitas

H_1 = terdapat heteroskedastisitas

H_0 diterima bila $-t_{tabel} < t_{hit} < t_{tabel}$ dan H_0 ditolak bila $t_{hit} > t_{tabel}$ atau $t_{hit} < -t_{tabel}$

Perhitungan dengan SPSS maka kesimpulannya adalah:

Sig < maka H_0 ditolak, artinya terdapat heteroskedastisitas.

Sig > maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti data *time series*). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari Autokorelasi. Aturan pengujiannya adalah:

- a. $d < dl > (4-dl)$, maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) $du < d < 4-du$, maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.
- b. $dl < d < du$ atau $(4-du) < d < (4-dl)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Rumus Uji Durbin Watson sebagai berikut:

$$d = \frac{\sum(e_n - e_{n-1})^2}{\sum e_x^2}$$

Keterangan:

d = nilai Durbin Watson

e = residual

Tabel 3.2

Range Durbin Watson untuk Autokorelasi

Durbin Watson	Kesimpulan
Kurang dari 1,10	Ada autokorelasi
1,10 – 1,54	Tidak ada kesimpulan
1,55 – 2,46	Tidak ada autokorelasi
2,47 – 2,90	Tidak ada kesimpulan
Lebih dari 2,91	Ada autokorelasi

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji koefisien regresi secara parsial (Uji t) dan uji koefisiensi regresi secara bersama-sama (Uji F) yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.

Hipotesis penelitiannya :

- a. $H_0 : b_1 = 0$, artinya secara parsial, tidak ada pengaruh antara variabel X_1 terhadap Y

$H_0 : b_2 = 0$, artinya secara parsial, tidak ada pengaruh antara variabel X_2 terhadap Y

b. $H_a : b_1 \neq 0$, artinya secara parsial, ada pengaruh antara variabel X_1 terhadap Y

$H_a : b_2 \neq 0$, artinya secara parsial, ada pengaruh antara variabel X_2 terhadap Y

Kriteria pengambilan keputusannya, yaitu :

- H_0 diterima apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X_1 dengan Y .
- H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y

Mencari t_{hitung} dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

b_i : koefisien regresi variabel i

S_{b_i} : standar error variabel i

2) Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap variabel – variabel independen secara bersama – sama yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dengan taraf signifikansi (α) 5%. Hipotesis penelitiannya adalah :

- $H_0 : b_1 = b_2 = 0$, artinya tidak ada pengaruh antara X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y .
- $H_a : b_1 \neq b_2 \neq 0$, artinya ada pengaruh antara X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y .

Kriteria pengambilan keputusan, yaitu :

- $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara X_1 dan X_2 secara bersama-sama
- $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh signifikan antara X_1 dan X_2 secara bersama-sama.

Mencari F_{hitung} dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 : Koefisien determinasi (residual)

k : jumlah variabel independen

n : Jumlah data

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1. Semakin besar nilai R^2 berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R^2

berarti semakin kecil variasi variable dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen.

Informasi yang dapat diperoleh dari koefisien determinasi R^2 adalah untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Dimana Rumus koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{(ryx_1)^2 + (ryx_2)^2 - 2 \cdot (ryx_1) \cdot (ryx_2) \cdot (rx_1x_2)}{1 - (rx_1x_2)^2}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

ryx_1 = korelasi sederhana antara X_1 dengan Y

ryx_2 = korelasi sederhana antara X_2 dengan Y

rx_1x_2 = korelasi sederhana antara X_1 dengan X_2

Sifat dari koefisien determinasi ini adalah :

(a) R^2 merupakan besaran non negatif.

(b) Batasannya adalah $0 < R^2 < 1$ (Damodar Gujarati).

R^2 bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variable-variabel independen dengan variabel yang dijelaskan. Dan jika R^2 bernilai 1, maka variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Sehingga, jika R^2 bernilai 1, maka semua titik observasi berada tepat pada garis regresi. Untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Ada pun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas disimbolkan dengan X, dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu *X1 Pajak Daerah* dan *X2 Dana Alokasi Umum*. Sedangkan variabel terikat disimbolkan dengan Y, dalam penelitian ini yaitu *Belanja Modal* yang diukur dengan melihat jumlah laporan realisasi anggaran pada masing – masing pemerintah daerah. Gambaran karakteristik variabel-variabel penelitian diperoleh dari hasil pengolahan data dengan analisis statistik deskriptif. Deskripsi masing-masing variabel disajikan dalam bentuk skor rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, standard deviasi, varians, dan distribusi frekuensi.

Berikut deskripsi statistik seluruh variabel dalam bentuk tabel berdasarkan perhitungan spss :

Tabel 4.1

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
BelanjaModal	254531.765	178374.12550	72
PajakDaerah	93781.2878	165481.72435	72
DanaAlokasiUmum	796054.958	274449.9583	72

Sumber : SPSS 16.0 , diolah peneliti tahun 2014

1. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Oleh karena itu, keputusan pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah sangat penting peranannya dalam menunjang pembangunan suatu daerah.

Pada penelitian ini jumlah pengalokasian belanja modal dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang terdapat pada website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (djpk.go.id). Jumlah ini menunjukkan jumlah alokasi APBD oleh pemerintah daerah dalam penyediaan aset tetap seperti pembangunan jalan raya, jembatan dan fasilitas umum lainnya yang memiliki manfaat secara langsung bagi masyarakat. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 72 kabupaten/kota.

Berikut dapat dijabarkan deskripsi statistik dari variabel Y, yakni belanja modal. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, jumlah belanja modal terbesar terbesar dimiliki oleh Kabupaten Bogor dengan jumlah Rp 1.035.470.000.000 Sedangkan jumlah belanja modal terkecil dimiliki oleh Kota Mojokerto dengan jumlah Rp 309.103.000.000.

Berdasarkan tabe 4.1 diatas, dengan menggunakan spss 16.0 berikut dapat dijabarkan deskripsi statistik dari variabel Y, yakni belanja modal. Jumlah belanja

modal pada 72 kabupaten/kota mempunyai rata – rata sebesar 254531.7656 dan standar Deviasi sebesar 178374.12550 (lihat tabel 4.1).

Dari data tersebut dibuatlah distribusi frekuensi untuk variable Y dengan cara menghitung range, banyaknya kelas interval, panjang kelas interval dengan menggunakan rumus sturges. Range dari variable Y adalah sebesar 974098,23 dengan banyak kelas 8 dengan menggunakan rumus sturges panjang kelas interval yaitu 121.762 (lampiran 6 hal.79).

Data selengkapnya dalam variabel ini dapat dilihat pada table distribusi di bawah ini :

Tabel 4.2.
Frekuensi Distribusi Belanja Modal

Kelas Interval			Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
61,372	-	183,134	61,371.5	183,134.5	24	33.3%
183,135	-	304,897	183,134.5	304,897.5	32	44.4%
304,898	-	426,660	304,897.5	426,660.5	10	13.9%
426,661	-	548,423	426,660.5	548,423.5	2	2.8%
548,424	-	670,186	548,423.5	670,186.5	1	1.4%
670,187	-	791,949	670,186.5	791,949.5	0	0.0%
791,950		913,712	791,949.5	913,712.5	1	1.4%
913,713		1,035,475	913,712.5	1,035,475.5	2	2.8%
Jumlah					72	100%

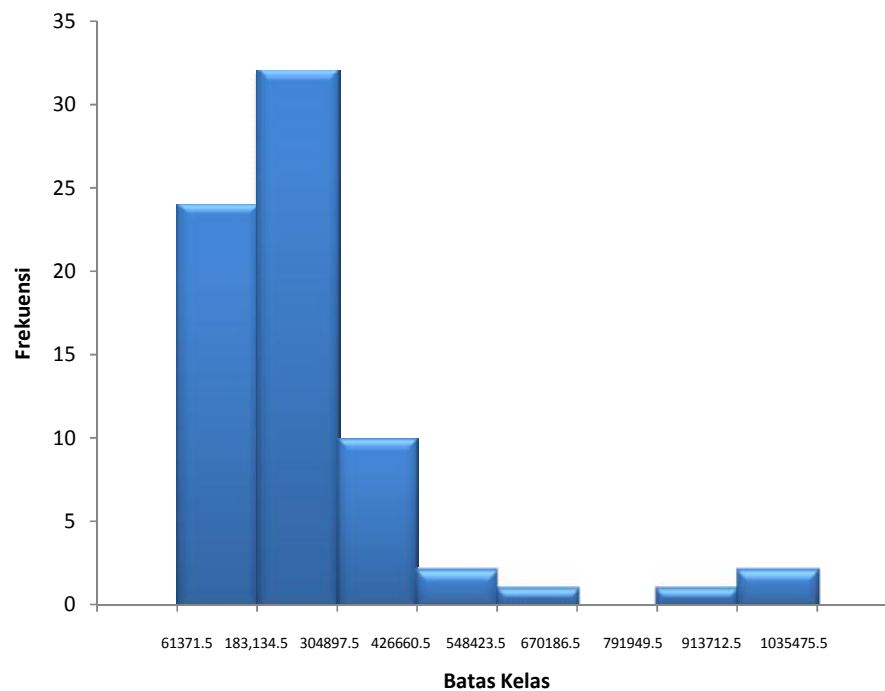
sumber : Data Belanja Modal 2012, diolah peneliti tahun 2014

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel Y di atas dapat dilihat banyaknya kelas interval sebesar 8 kelas. Pada kelas kedua yaitu interval 183.135 – 304.897 memiliki frekuensi data terbesar yaitu sebanyak 32 kabupaten/kota atau 44,4% dari keseluruhan sampel. Sedangkan kelas kedelapan yaitu interval 791.950 – 913.712 memiliki frkuensi data terkecil yaitu sebanyak 1

kabupaten/kota atau sekitar 1,4% dari keseluruhan sampel. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota masih lebih banyak mengalokasikan anggarannya kepada selain belanja modal. Belanja pemerintah daerah ini biasanya lebih banyak dialokasikan kepada belanja operasi, diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja hibah. Hal ini juga berarti pembangunan fisik atau belanja investasi suatu daerah belum menjadi prioritas pemerintah daerah.

Data lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram histogram di bawah ini :

Gambar 4.1.
Grafik Histogram Belanja Modal



Sumber : data pembiayaan bagi hasil, diolah peneliti tahun 2014

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah dengan jumlah penerimaan terbesar. Pajak daerah memiliki peranan penting dalam proses kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam penelitian ini, pajak daerah sebagai variabel disimbakan dengan X_1 . Pajak daerah merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah yang dipublikasikan di website direktorat jendral perimbangan keuangan kementerian keuangan RI. Berikut dapat dijabarkan deskripsi statistik dari variabel X_1 , yakni Pajak Daerah. Dari data 72 sampel, diketahui mempunyai rata – rata sebesar 93781.2878 dan Standar Deviasi 165481.72435 (Lihat tabel 4.1).

Pada penelitian ini jumlah Pajak Daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Bandung dengan jumlah Rp 820.564.000.000 dan jumlah pajak daerah terendah dimiliki oleh Kota Sampang dengan jumlah Rp 7.230.000.000. Berikut dapat dijabarkan deskripsi statistik dari variabel X_1 , yakni Pajak Daerah. Data rasio Pajak Daerah pada 72 sampel mempunyai rata-rata sebesar 120,925.08 dan Standard Deviasi 267,580.696 (lihat tabel 4.1).

Dari data tersebut dibuatlah distribusi frekuensi untuk variable X_1 dengan cara menghitung range, banyaknya kelas interval, panjang kelas interval dengan menggunakan rumus sturges. Range dari variabel Y adalah sebesar 813.334,39 dengan banyak kelas 8 dengan menggunakan rumus sturges panjang kelas interval yaitu 101.666. (lampiran 4 hal.77).

Data selengkapnya dalam variabel ini dapat dilihat pada tabel distribusi di bawah ini :

Tabel 4.3.
Frekuensi Distribusi Pajak Daerah

Kelas Interval			Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
7,230	-	108,896	7,229.5	108,896.5	59	81.9%
108,897	-	210,563	108,896.5	210,563.5	6	8.3%
210,564	-	312,230	210,563.5	312,230.5	1	1.4%
312,231	-	413,897	312,230.5	413,897.5	1	1.4%
413,898	-	515,564	413,897.5	515,564.5	1	1.4%
515,565	-	617,231	515,564.5	617,231.5	2	2.8%
617,232		718,898	617,231.5	718,898.5	0	0.0%
718,899		820,565	718,898.5	820,565.5	2	2.8%
Jumlah					72	100%

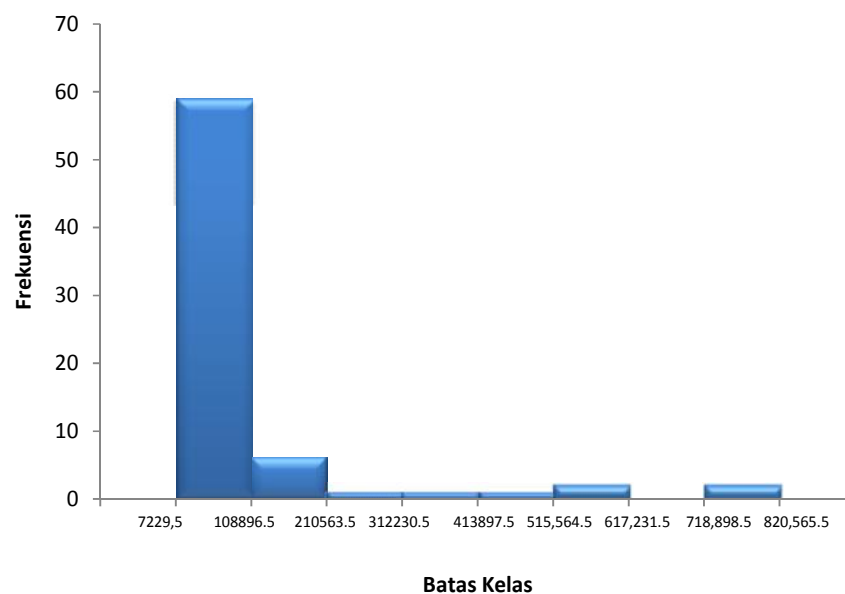
sumber : Data Pajak Daerah tahun 2012, diolah peneliti tahun 2014

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel X_1 di atas dapat dilihat banyaknya kelas interval sebesar 8 kelas. Pada kelas pertama yaitu interval 7.230-108.896 memiliki frekuensi data terbesar yaitu sebanyak 59 kabupaten/kota atau 81,9% dari keseluruhan sampel. Sedangkan kelas kedelapan yaitu interval 413.898 – 515,564 memiliki frekuensi data terkecil yaitu sebanyak 1 kabupaten/kota atau sekitar 1,4% dari keseluruhan sampel. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota masih lebih banyak mengalokasikan anggarannya kepada selain belanja modal. Belanja pemerintah daerah ini biasanya lebih banyak dialokasikan kepada belanja operasi, diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja hibah. Hal ini juga berarti

pembangunan fisik atau belanja investasi suatu daerah belum menjadi prioritas pemerintah daerah.

Data lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram histogram di bawah ini :

Gambar 4.2.
Grafik Histogram Pajak Daerah



Sumber : data Pajak Daerah 2012, diolah peneliti tahun 2014

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto.

Pada penelitian ini Dana Alokasi Umum berlaku sebagai variabel bebas dan disimbolkan dengan X_2 . Jumlah Dana Alokasi Umum merupakan data sekunder

yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang dipublikasikan di *website* direktorat jendral perimbangan keuangan kementerian keuangan RI. Berikut dapat dijabarkan deskripsi statistik dari variabel X_2 , yakni Dana Alokasi Umum. Dari data 72 sampel, diketahui mempunyai rata – rata sebesar 796054.9583 dan Standar Deviasi sebesar 274449.51277 (lihat tabel 4.1).

Pada penelitian ini jumlah Dana Alokasi Umum tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bogor dengan jumlah Rp 1.672.610.000.000 dan Dana Alokasi Umum terendah dimiliki oleh Kota Mojokerto dengan jumlah Rp 309.103281.851.000.000. Dari data tersebut dibuatlah distribusi frekuensi untuk variable X_2 dengan cara menghitung range, banyaknya kelas interval, panjang kelas interval dengan menggunakan rumus sturges. Range dari variable X_2 adalah sebesar Rp 1.363.507 dengan banyak kelas 8 dan panjang kelas interval yaitu Rp 170.438 (lampiran 5 hal.78).

Data selegkapnya dalam variabel ini dapat dilihat pada table distribusi di bawah ini :

Tabel 4.4.
Frekuensi Dana Alokasi Umum

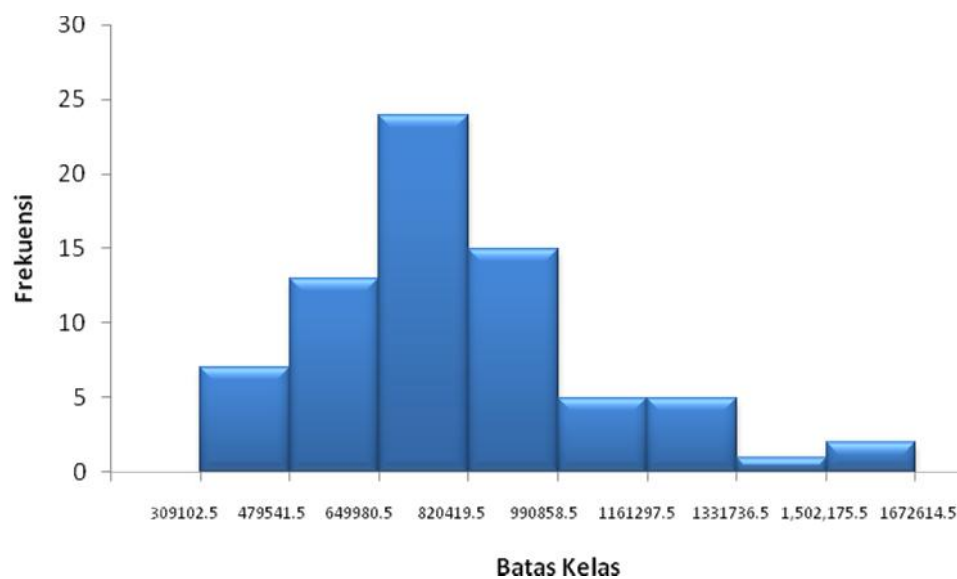
Kelas Interval			Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
309,103	-	479,541	309,102.5	479,541.5	7	9.7%
479,542	-	649,980	479,541.5	649,980.5	13	18.1%
649,981	-	820,419	649,980.5	820,419.5	24	33.3%
820,420	-	990,858	820,419.5	990,858.5	15	20.8%
990,859	-	1,161,297	990,858.5	1,161,297.5	5	6.9%
1,161,298	-	1,331,736	1,161,297.5	1,331,736.5	5	6.9%
1,331,737	-	1,502,175	1,331,736.5	1,502,175.5	1	1.4%
1,502,176	-	1,672,614	1,502,175.5	1,672,614.5	2	2.8%
Jumlah					72	100%

sumber : Data Dana Alokasi Umum 2012, diolah peneliti tahun 2014

Dari tabel distribusi di atas dapat diamati bahwa penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat dalam hal ini dana alokasi umum relatif merata di semua sampel. Dari 72 sampel terlihat sebanyak 24 tertinggi sampel berada pada interval antara 649,981- 820,419, hal ini mengindikasikan bahwa 33,30% penerimaan dana alokasi umum diterima secara merata oleh kabupaten/kota. Sedangkan interval penerimaan DAU terendah yaitu berkisar antara 1,331,737 - 1,502,175 hanya berjumlah 1 atau sekitar 1,4% dari 72 sampel.

Data lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram histogram di bawah ini :

Gambar 4.3.
Grafik Histogram Dana Alokasi Umum



Sumber : data Dana Alokasi Umum tahun 2012, diolah peneliti tahun 2013

B. Pengolahan data dan Pengujian Hipotesis

1. Persamaan Regresi

Langkah pertama peneliti menghitung persamaan regresi berganda. Persamaan regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan secara linier

dari Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten/kota dimana dapat dinyatakan dengan rumus linier berganda sebagai berikut $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$. Pada perhitungan ini peneliti menggunakan program SPSS 16.0. dengan melihat tabel *Coefficients* pada kolom *Unstandardized Coefficients* di sub-kolom B maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut $Y = -2.433 + 0.144X_1 + 0.974X_2$.

Tabel 4.5.
Persamaan Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.433	1.509		-1.612	.111
Pajak Daerah (X ₁)	.144	.038	.299	3.803	.000
Dana Alokasi Umum (X ₂)	.974	.121	.633	8.044	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber : SPSS 16.0, diolah peneliti tahun 2013.

Persamaan regresi tersebut artinya jika Pajak Daerah (X₁) dan Dana Alokasi Umum (X₂) nilainya adalah 0, maka Pembiayaan (Y') nilainya adalah -2.433 sementara untuk koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X₁) sebesar 0.144 memiliki arti jika Pajak Daerah mengalami kenaikan 1 satuan, maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan pula sebesar 0.144 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara Pajak Daerah dengan Belanja Modal. Sementara untuk koefisien regresi variable Dana Alokasi Umum (X₂) sebesar 0.974 memiliki arti jika pendapatan bagi hasil mengalami kenaikan sebesar 1 satuan,

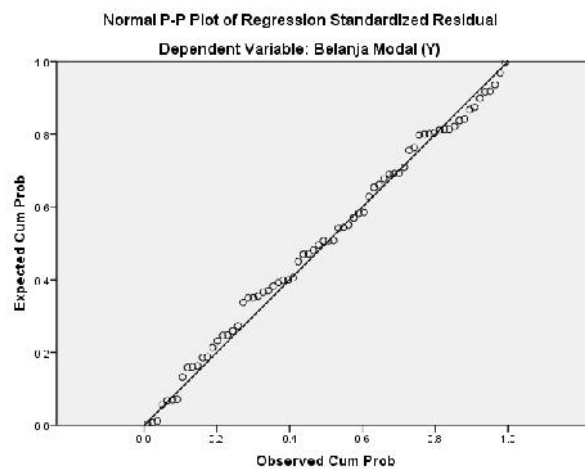
maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0.974 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

2. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data ini dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik-titik) pada *Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual* dari variabel independen. Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan *P-P Plot* dapat dilihat pada gambar 4.4.

Gambar 4.4



Dari grafik normal *P-P Plot* tersebut dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Penyebaran titik-titik tersebut menyimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Atau dengan kata lain, data penelitian berdistribusi secara normal.

Selain dengan melihat grafik *P-P Plot*, uji normalitas juga dilihat dengan melakukan uji *Liliefors*. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dengan memperhatikan

angka yang tertera pada kolom *significance Kolmogorov-Smirnov* dalam tabel *Test of Normality*.

Tabel 4.6
Uji Normalitas

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Pajak Daerah (X1)	Dana Alokasi Umum (X2)	Belanja Modal (Y)
N		72	72	72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	10.6215	13.5265	12.2799
	Std. Deviation	1.15393	.36176	.55721
Most Extreme Differences	Absolute	.128	.101	.074
	Positive	.128	.066	.074
	Negative	-.068	-.101	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		1.086	.855	.631
Asymp. Sig. (2-tailed)		.189	.457	.820

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variable Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara berturut-turut memiliki nilai 0.189, 0.457, dan 0.820 masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0.05 yang artinya data berdistribusi normal.

Uji Perhitungan Normalitas dengan menggunakan Ms.Excel terdapat di lampran 3 halaman ...

b. Uji Multikoleniaritas

Uji multikoliniearitas digunakan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (independen) dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai yang tertera pada kolom VIF (*Variable Inflation Factor*) dan *tolerance* dalam tabel *Coefficients*. Apabila nilai *tolerance* < 0,1 dan VIF

> 10, maka terjadi multikolinieritas. Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Tabel Multikoleniaritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Daerah (X1)	.813	1.230
	Dana AlokasiUmum (X2)	.813	1.230

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)
Sumber : data olahan SPSS 16.0 , data diolah peneliti 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal memiliki nilai *tolerance* > 0,1. Kedua variabel independen tersebut juga memiliki nilai VIF < 10. Kedua hal tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa antar variabel bebas dalam model regresi penelitian ini tidak terdapat korelasi.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linier. Dengan kata lain, uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi ini dilakukan dengan melakukan uji *Durbin-Watson* (DW). Untuk taraf signifikansi 5% dengan jumlah variabel independen 2 dan sampel 72 diperoleh nilai batas bawah (dL)= 1,5577 dan nilai batas bawah (dU) = 1,6733. Berdasarkan data tersebut, diperoleh 4-dU = 2,32 dan 4-dL = 2,442. Setelah dilakukan pengujian autokorelasi

dengan menggunakan SPSS versi 16.0, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada kolom Durbin-Watson dalam tabel Model Summary sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.808 ^a	.653	.643	.33284	1.783

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum (X2), Pajak Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber : output SPSS 16.0, data diolah peneliti 2014

Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai DW sebesar 1.783. Angka tersebut berada di antara dua dan empat (1,6733- 2,32) maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi.

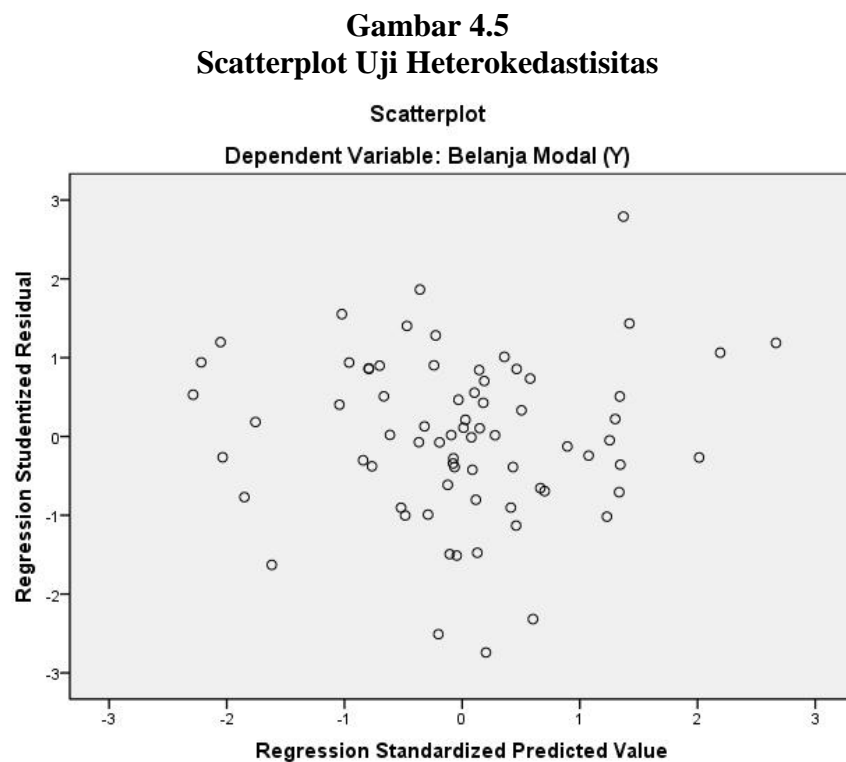
d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Satu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) residual yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastik, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varians yang sama (Gujarati). Uji ini dilakukan dengan mengamati pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi adanya heterokedastisitas pada data penelitian dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Apabila pada grafik *scatterplot* terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi masalah heteroskedastisitas

b. Sedangkan apabila titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil pengujian heterokedastisitas pada data penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Output SPSS 16.0, data diolah tahun 2014.

Pada grafik *scatterplot* di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang terbentuk. Titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y. Hal tersebut berarti tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada data penelitian. Namun, analisis dengan grafik plots ini memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting.

Oleh sebab itu, peneliti menggunakan uji lain untuk lebih menjamin keakuratan hasil. Uji yang digunakan adalah uji *Nonparametric Correlation* :

Tabel 4.9
Nonparametic Correlation
Correlations

		Correlations		
		Pajak Daerah (X1)	Dana Alokasi Umum (X2)	Belanja Modal (Y)
Pajak Daerah (X1)	Pearson Correlation	1	.433**	.573**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	72	72	72
Dana Alokasi Umum (X2)	Pearson Correlation	.433**	1	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	72	72	72
Belanja Modal (Y)	Pearson Correlation	.573**	.762**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : output SPSS 16.0 , data diolah peneliti tahun 2014

Dari output Correlation di atas, dapat diketahui korelasi antara Pajak Daerah dengan *Pearson Correlation* menghasilkan nilai signifikansi 0.573 dan korelasi antara Dana Alokasi Umum dengan *Pearson Correlation* menghasilkan nilai signifikansi 0.762 karena nilai signifikansi korelasi lebih dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Korelasi Ganda

Pengujian koefisien korelasi ini menggunakan perhitungan *Product Moment* untuk mengetahui seberapa besar dan kuatnya hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y.

Berdasarkan hasil perhitungan *Product Moment* yang telah dilakukan diperoleh R_{yx1x2} sebesar 0,808 dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 dari sampel

sebanyak 72 kabupaten/kota yang berarti $R > 0$ di mana menunjukkan hubungan antar variabel X1 dan X2 dengan Y memiliki keeratan sedang dan positif.

Tabel 4.10
Uji Koefisien Korelasi Ganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.808 ^a	.653	.643	.33284

a. Predictors: (Constant), Dana AlokasiUmum (X2), Pajak Daerah (X1)

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengujian dengan SPSS 16.0 diperoleh hasil ANOVA pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.11
Uji F (ANOVA)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.400	2	7.200	64.993	.000 ^a
	Residual	7.644	69	.111		
	Total	22.044	71			

a. Predictors: (Constant), Dana AlokasiUmum (X2), Pajak Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber : SPSS 16.0, data diolah tahun 2014

Hasil yang diperoleh dari uji F dalam tabel ANOVA di atas adalah nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut bernilai kurang dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa variabel independen Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Belanja Modal. Dapat dikatakan pula, dikarenakan probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen Belanja Modal. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $n=72$, $k=2$, diperoleh df 1 (jumlah variabel-1) sebesar 1 dan df 2

($n-k-1$) sebesar 69. Hasil yang diperoleh untuk F tabel adalah 3,12. Nilai F hitung yang diperoleh dari hasil SPSS adalah 64,993. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel ($64,993 > 3,12$) maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal

c. Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan $n=72$, $k=2$ diperoleh df sebesar 69 ($df=72-2-1$). Dengan df 69 dan signifikansi sebesar 0,05, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,667.

Hasil dari uji T yang diperoleh dari SPSS dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.433	1.509		-1.612	.111
Pajak Daerah (X1)	.144	.038	.299	3.803	.000
Dana Alokasi Umum (X2)	.974	.121	.633	8.044	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber : output SPSS 16.0, data diolah peneliti tahun 2014

1) Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama (H1) penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah dengan Belanja Modal. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung sebesar 3.803. Hasil

tersebut berarti lebih tinggi dari t tabel sebesar 1,667 ($3.803 > 1,667$), yang berarti bahwa hipotesis pertama diterima. Tingkat signifikansi Pajak Daerah juga diperoleh sebesar 0,000, lebih kecil dari signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variable Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dapat juga dikatakan bahwa variable Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2) Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua (H2) penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Berdasarkan hasil yang terdapat pada Tabel 4.10 dari pengujian dengan menggunakan SPSS, didapat hasil t hitung sebesar 8.044. Hasil tersebut berarti lebih tinggi dari t tabel sebesar 1,667 ($8.044 > 1,667$), Tingkat signifikansi pendapatan bagi hasil juga diperoleh sebesar 0,000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Belanja Modal. Dapat dikatakan juga bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar prosentase variabel independen (Dana Alokasi Umum dan Pajak Daerah) secara bersama-sama menjelaskan variabel dependen belanja modal.

Tabel 4.12
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.808 ^a	.653	.643	.33284	1.783

- a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum (X2), Pajak Daerah (X1)
- b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber : output SPSS 16.0, data diolah peneliti tahun 2014

Hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan nilai *adjusted R Square* sebesar 0,643. Hal ini berarti 64,3% Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen (Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum), sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini akan membahas hasil penelitian sesuai dengan masalah yang diajukan berdasarkan pengolahan data dari Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2012. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama yang menyebutkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pemerintah daerah dapat diterima dengan adanya hasil penelitian diatas. Angka koefisien yang bernilai positif menjelaskan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syukriy Abdullah dan Abdul Halim tahun 2003, Darwanto dan Yulia Yustikasari tahun 2007, serta Arbie Gugus Wandira tahun 2012. Ketiga penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa pajak daerah yang juga merupakan komponen dari pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Hal ini sesuai dengan fungsi Pajak Daerah sebagai fungsi *budgeter*, dimana pajak merupakan instrument untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Namun, walaupun pajak daerah merupakan instrument terbesar dari Pendapatan Asli Daerah patut diakui bahwa jumlah penerimaannya masih terbilang rendah dibandingkan dengan sektor penerimaan lain

Dilihat dari data sampel yang digunakan, 5 kabupaten/kota yang memiliki penerimaan pajak daerah terendah berada di wilayah Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki jumlah yang rendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Kendati demikian, secara keseluruhan di Pulau Jawa, pajak daerah tetap berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan uji T menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel ($3,803 > 1,677$) dan memiliki signifikansi 0,00 lebih kecil dari signifikansi 0,005.

Masih rendahnya penerimaan pajak daerah di beberapa wilayah perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah bersangkutan. Oleh karena itu, sesuai dengan semangat otonomi daerah serta demi tercapainya kemandirian pemerintah daerah, dibutuhkan usaha pemerintah daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara diantaranya; peningkatan sosialisasi pajak daerah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memberikan pelayanan pajak yang mudah dan lebih baik. Dengan usaha tersebut, diharapkan pemerintah daerah mampu lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna menunjang

kemandirian finansial daerah bersangkutan dengan tetap berpegang prinsip tidak pajak terlalu membebani rakyat.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja modal

Hipotesis kedua yang menyebutkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pemerintah daerah dapat diterima dengan adanya hasil penelitian di atas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim pada tahun 2003 serta penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati di tahun 2011. Kedua peneliti ini mendapatkan hasil bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Tuasikal tahun 2008, dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dimana dana alokasi umum merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan.

Didalam tabel distribusi frekuensi terlihat bahwa penerimaan dana alokasi umum pada setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa relatif merata. Hal ini memang dikarenakan dana alokasi umum mempunyai tujuan untuk pemerataan pendapatan pemerintah daerah. Jadi bagi pemerintah daerah yang masih minim penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah, tetap mampu menjalankan roda pemerintahannya dengan dibantu dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Selain itu sektor dana alokasi umum juga masih menjadi sektor penerimaan terbesar bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dana alokasi umum dari pemerintah pusat masih menjadi sandaran utama pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya baik untuk keperluan belanja rutin atau belanja pembangunan.

Dari hasil penelitian ini juga terbukti bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Hal terbukti bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel ($8.044 > 1,667$) dan nilai signifikansi $0,000$ atau lebih kecil dari $0,005$.

3. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Secara Simultan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, hipotesis ketiga yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Daerah dan DAU secara simultan terhadap Belanja Modal dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yulia Yustikasari tahun 2007, Kusnandar dan Dodik Siswanto, Kesit Bambang Prakosa tahun 2004. Ketiga penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Pada kondisi saat ini, pajak daerah dan dana alokasi umum menjadi perpaduan yang penting dalam hal penerimaan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan agenda bersama pemerintah daerah dalam rangka otonomi dan kemandirian daerah, sedangkan dana alokasi umum adalah representasi dari peran pemerintah atas keberlangsungan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini beberapa pemerintah daerah di Wilayah Jawa timur yang masih minim penerimaan pajak daerahnya, dapat mengandalkan dana alokasi umum dalam menjalankan roda pemerintahannya. Oleh karena itu pajak daerah dan dana alokasi umum ini tentunya memiliki pengaruh besar dalam alokasi pengeluaran pemerintah daerah.

Dari penelitian ini juga terbukti bahwa Uji F nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,050. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Meskipun penelitian telah dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan, peneliti menyadari ada keterbatasan-keterbatasan yang dialami dan tidak sepenuhnya hasil penelitian ini mencapai tingkat kebenaran yang mutlak. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang peneliti alami dalam meneliti hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemda ini antara lain adalah sebagai berikut:

1) Terbatasnya penggunaan sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa sehingga belum mampu menggambarkan kondisi keuangan pemerintahan daerah seluruh Indonesia.

2) Terbatasnya variabel yang diteliti

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti variabel pajak daerah dan dana alokasi umum saja yang memengaruhi belanja modal sedangkan masih terdapat banyak variabel lain yang juga berpengaruh besar terhadap belanja modal.

3) Periode penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 2012. Data ini merupakan realisasi 2 tahun lalu sehingga kurang bisa menggambarkan kondisi kekinian dari keuangan pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota 2012.
2. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota 2012.
3. Pajak daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.
4. Antara variabel pajak daerah, dana alokasi umum terhadap belanja modal memiliki hubungan positif dengan nilai koefisien korelasi R adalah 0,808.
5. Pajak daerah dan dana alokasi umum memiliki koefisien determinasi sebesar 64,3%. Hal ini berarti pajak daerah dan DAU mempengaruhi belanja modal sebanyak 41%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh sumber penerimaan lain pemerintah daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil, dll.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa pajak daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh dengan jumlah alokasi belanja modal pemerintah daerah. Dengan demikian, implikasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya adalah :

1. Pajak daerah dan dan alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi penerimaan pajak daerah dan dana alokasi umum, maka semakin tinggi pula alokasi belanja modal guna pembangunan pemerintah daerah.
2. Pajak daerah dan dana alokasi umum memiliki hubungan yang cukup signifikan dengan jumlah belanja modal. Namun, bukan hanya pajak daerah dan dana alokasi umum saja yang dapat mempengaruhi jumlah alokasi belanja modal pemerintah daerah. Selain faktor diatas masih banyak faktor lain belanja modal seperti retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah, kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian belanja modal dalam APBD, dll.
3. Dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal tidak hanya pajak daerah dan belanja modal saja, maka pemerintah daerah juga harus memperhatikan faktor – lain tersebut diatas untuk mendukung pembangunan daerah dan terciptanya kesejahteraan di masyarakat di daerah secara merata.

C. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah daerah sebaiknya lebih rajin dalam melaporkan laporan realisasi anggaran kepada pihak yang berkepentingan, karena laporan realisasi anggaran dapat dijadikan sumber penelitian dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran – ukuran atau jenis – jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih luas misalnya kabupaten/kota se-Indonesia atau dapat membandingkan kondisi Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional VI. Surabaya.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X. 2007.
- Fidel. *Cara Mamahami Masalah – Masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana, 2010.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Harianto, David dan Adi, Priyo Hari. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita*. Simposium Nasional Akuntansi X. 2007.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. 1994. *Intertemporal analysis of state and local government spending: Theory and tests*. Journal of Urban Economics 35: 159-174.
- Hussain, M. Haider. *On the Causal Relationship between Government Expenditure and Tax Revenue in Pakistan*. The Lahore Journal of Economics, Vol.9, No.2. Pakistan
- Ihdijoso, Brahmantyo dan Wibowo, Tri. *Kajian Ekonomi dan Keuangan. Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah*. vol.6 No.1. 2002. p.22-56
- Lubis, Irwansyah. *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2011.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Eralangga, 2010.
- Nordiawan, D., Putra IS., dan Rahmawati M. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005) p.10

- Prakosa, K.B. JAAI. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah*. Vol.8 No.2, 2004. p.101 – 118.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Riyanto dan Siregar, Herman. *Dampak Dana Perimbangan Terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan antar wilayah*. Jurnal Kebijakan Ekonomi . Vol. No.1 Agustus 2005. Kampus Baru UI Depok.
- Simanjuntak, Hamonangan dan Mukhlis, Imam. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses, 2012.
- Sidiq, Machfud. *Dana Alokasi Umum. Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Situngkir, Anggiat dan Manurung, John Sihar. *Efek Memiliki Pendapatan Asli Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara*. Kajian Akuntansi. Vol.4 No.2, 2009. p. 93-103.
- Sugiyono. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta, 2007.
- Suparmoko. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Taha, Roshaliza dan Loganathan Nanthakumar. *Causality Between Tax Revenue and Government Spending in Malaysia. The International Journal of Business and Finance Research*. Volume 2 Number 2. 2008. p.63-73
- Tuasikal, Askam. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. *Pengaruh DAU, DAK, PDB, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Indonesia*. Ambon : Universitas Pattimura, 2008.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1* . Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Wandira, A.G. Accounting Analysis Journal. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. 2012. p. 44-51
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dari Internet :

Anggaran Pemerintah Daerah Habis Hanya untuk Bayar Gaji PNS. 2013.
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/08/20/46007/anggaran_pemerintah_daerah_habis_hanya_untuk_bayar_gaji_pns/#.UoSmridIm1s.
Diakses tanggal 14 November 2013.

Ketimpangan Ekonomi Semakin Lebar. 2013.
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/05/21/07403940/Ketimpangan.Ekonomi.Semakin.Lebar>. Diakses 8 September 2013

Pajak Subang 78,64% Pendapatan Negara. 2013.
<http://www.antaraneews.com/berita/324540/pajak-sumbang-7864-persen-pendapatan-negara>. Diakses 4 September 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



HARYANTO, Lahir di Batang Jawa Tengah pada 10 Oktober 1989, merupakan anak ke-9 dari 10 bersaudara. Menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Gapuro tahun 1996, kemudian tahun 2002 melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pekalongan. Tahun 2005 melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pekalongan tahun. Selanjutnya tahun 2008 menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi dengan Konsentrasi Pendidikan Akuntansi.

Pengalaman organisasi. Semasa SMA mengikuti organisasi OSIS, Pramuka, Passusbra (Pasukan Khusus Pengibar Bendera) dan RaMa (Remaja Masjid). Dimasa kuliah aktif pada organisasi Unit Kesenian Mahasiswa UNJ (UKM UNJ) sebagai Ketua Sub Unit Band tahun 2010. Selain itu juga aktif pada organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga menjabat Pengurus PMII Cabang Jakarta Timur.